

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEDAH RUMAH
PADA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DI DESA RINTISAN KECAMATAN DANAU PANGGANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

SITI ZAH RATUN NUFUS

2022443

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2025

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : SITI ZAH RATUN NUFUS
NPM : 2022443
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, Oktober 2025

Pembimbing I



Sri Agusmila Herlinda, S.Pd, M.AP.
NUPTK. 9149753655300033

Pembimbing II



Mahdalina, S.Pd.I, M.Pd.
NUPTK. 0433765666300192

Plt. Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEDAH RUMAH PADA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DESA RINTISAN KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pemikiran dan pemberian data-data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat. Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQaR., CIQnR, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Ibu Sri Agusmila Herlinda, S.Pd, M.AP. Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Mahdalina, S.Pd.I, M.Pd. Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Seluruh dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik (STIA) Amuntai.
5. Seluruh keluarga yang sudah memberi semangat dan do'a nya dalam pembuatan proposal skripsi ini.
6. Serta teman-teman di STIA Amuntai yang turut mrmbantu dan saling memotivasi hingga dapat menyelesaikan proposal skripsi bersama-sama.
7. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian proposal skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih ada kekurangan, karena terbatasnya pengetahuan. Untuk itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Amuntai, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Teoritis.....	15
1. Kebijakan Publik.....	14
2. Implementasi Kebijakan	21
3. Pelaksanaan Kebijakan	33
4. Kemiskinan	34
5. Devinisi Rumah Tidak Layak Huni	39
C. Kerangka Pemikiran.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45

C. Tipe Penelitian	45
D. Data Sumber Data.....	46
E. Desain Operasional Penelitian	48
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Analisis Data	50
H. Uji Kredibilitas Data.....	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Nama Penerima RS-RTLH	5
Tabel 3. 1 Identitas Informan	48
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	43
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, kemiskinan merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia. Kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi yang tinggi, hal ini menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin karena mereka tidak sadar akan kemiskinannya sendiri. Selain itu kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh dibawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, tuna Susila, pengangguran, kejahatan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Dimana masalah kemiskinan hingga kini selalu menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Dengan melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia yang cukup besar, perlu adanya penanganan yang serius. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup kehidupan fisik, mental dan sosial.

Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai wilayah yang padat penduduk dan pemukiman, tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan. Salah satu contohnya adalah desa rintisan, Dimana masih banyak terdapat rumah tinggal yang kurang layak atau tidak layak huni.

Dalam menjalani kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana ia tinggal, tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia tanpa tempat tinggal yang layak manusia tidak akan hidup dengan layak. Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan akan sandang dan pangan meskipun kenyataannya terdapat peringkat akan pemenuhan itu dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas. Teori Maslow menyebut bahwa sesudah manusia terpenuhi kebutuhan jasmaninya yaitu sandang, pangan dan Kesehatan, kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi lagi. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi kehidupan manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya.

Tempat tinggal merupakan pencerminan dan penjelasan secara mendetail tentang diri pribadi manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam kebersamaan di dalam masyarakat. Dengan demikian Rumah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi jadi jika ditinjau dari proses bermukim rumah merupakan sarana untuk berlindung dari alam memberi ketentraman hidup dan pusat kegiatan budaya. Dirumah dan

dilingkunganlah dibentuk kepribadian manusia, maka dari itu dibutuhkan perumahan yang aman dan nyaman.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik, maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memiliki rasa kenyamanan dan secara social menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media sebagai pelaksana bimbingan serta pendidikan keluarga. Pada hakikatnya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi Sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik mental dan social ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal tersebut dikhawatirkan berimplikasi pada ketelantaran keluarga dan lebih jauh lagi pada ketunaan sosial. Untuk mencegah hal tersebut salah satu program penanggulangan kemiskinan di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Program bedah rumah atau Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program-program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program-program yang dibuat pemerintah tidak hanya berfokus kepada

bantuan stimulant usaha ekonomi produktif seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ataupun berbentuk bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Rastra.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak sebagai tempat tinggal serta sarana pembinaan keluarga. Selain itu, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai program, salah satunya program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Namun pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin pun tidak luput dari perhatian pemerintah sehingga pada tahun 2011 Pemerintah melalui Kementrian Sosial Republik Indonesia membuat program bedah rumah atau Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan program bedah rumah atau Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni salah satunya adalah yang berjalan di Desa Rintisan Kecamatan Danau

Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun daftar nama yang sudah menerima bantuan Rehabilitas sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Data Nama Penerima RS-RTLH Desa Rintisan
Tahun 2025

No.	Nama	Besar Anggaran	Ket.
1	2	3	4
1	Hamdani	1x 20.000.000	Sudah
2	Saipullah	1x 20.000.000	Sudah
3	Hadi	1x 20.000.000	Sudah
4	Siti Radiah	1x 20.000.000	Sudah
5	Jamhur	1x 20.000.000	Sudah
6	Yati	1x 20.000.000	Sudah
7	Ubay	1x 20.000.000	Sudah
8	Atnani	1x 20.000.000	Belum
9	Hairansyah	1x 20.000.000	Belum
10	Sabrudin	1x 20.000.000	Belum

Sumber Data : Nama Penerima RS-RTLH Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa anggaran untuk setiap penerima bantuan RS-RTLH adalah Rp 20.000.000 per unit, dana bersumber dari APBD Kabupaten.

Program bedah rumah atau Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah program yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin (RTM) yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin

melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah dalam negeri, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan APBD kota/kabupaten maupun sumber dana lain yang mengikat.

Dalam Pelaksanaannya, program bedah rumah atau Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) hanya melakukan pemugaran atau rehab rumah karena bantuan yang diberikan bersifat stimulan dan terbatas, maka hanya cukup untuk memperbaiki bukan untuk merehab total bagian rumah. Rumah yang direhab tersebut harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Keberadaan RS-RTLH setidaknya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun syarat-syarat penerima bantuan RS-RTLH sebagai berikut:

1. Fakir miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Belum pernah mendapat RS-RTLH
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
4. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari Pembuat Akta tanah.

Agar pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka diperlukan serangkaian tahapan yang dilakukan secara sistematis.

Tahapan tersebut meliputi :

1. Identifikasi dan Inventarisasi

Tahap awal berupa pendataan dan pengumpulan informasi mengenai calon penerima bantuan berdasarkan basis Data Terpadu Rumah Tangga Miskin yang tersedia di desa atau kelurahan.

2. Verifikasi dan Validasi Lapangan

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran kondisi rumah dan memastikan bahwa calon penerima memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

3. Verifikasi Akhir Administrasi

Calon penerima yang telah lolos verifikasi lapangan kemudian diminta melengkapi dokumen administrasi, seperti identitas diri dan bukti kepemilikan tanah. Dokumen tersebut diverifikasi untuk menghindari kesalahan data dan memastikan keabsahannya.

4. Penetapan Calon Penerima Bantuan

Setelah semua proses verifikasi selesai, pihak yang berwenang baik dari tingkat desa maupun kabupaten akan menetapkan daftar final penerima bantuan RS-RTLH, yang kemudian akan diumumkan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahuinya.

Di tingkat kelurahan atau desa, data penerima bantuan bedah rumah atau Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni diperoleh berdasarkan laporan dari masyarakat setempat, termasuk aparat kelurahan/desa, tokoh masyarakat, maupun keluarga calon penerima bantuan. Data tersebut kemudian disampaikan ke pihak dinas perumahan, kawasan pemukiman dan lingkungan hidup untuk ditindaklanjuti. Agar pelaksanaan program Bedah Rumah atau Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait dalam kegiatan tersebut, sehingga hasil yang dicapai dapat optimal.

Berdasarkan hasil observasi peneliti kepada masyarakat, bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Ketidaktepatan sasaran program, dimana bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pada kenyataannya masih diterima oleh warga yang secara ekonomi tergolong mampu atau memiliki kondisi rumah yang masih layak huni. *(Sumber :Nama Penerima RS-RTLH Tahun 2025)*
2. Kurangnya koordinasi antara aparat desa dengan Ketua RT. RT yang seharusnya memiliki posisi strategis karena paling mengetahui kondisi warganya justru tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan maupun pengawasan. *(Sumber : Observasi Peneliti)*
3. Ketidakpercayaan publik karena kurang transparansi dan informasi yang jelas dapat menurunkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan program. *(Sumber : Observasi Peneliti)*

Masalah-masalah tersebut menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pelaksanaan kebijakan yang seharusnya berjalan partisipatif, transparan, dan tepat sasaran. Padahal, keberhasilan program sangat ditentukan oleh akurasi data, sinergi antar pihak terkait, serta pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat program tersebut.

Melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Danau Panggang yang sebagian besar masih tergolong berpenghasilan menengah ke bawah, maka pelaksanaan program bantuan sosial seperti Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. Hal ini penting guna memastikan bahwa implementasi program benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Sehingga, dari paparan diatas tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal apa saja yang dapat meningkatkan upaya pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan program RS-RTLH Kecamatan Danau Panggang pada desa yang menerima RS-RTLH tersebut yaitu pada Desa Rintisan agar berjalan lebih optimal dan tepat sasaran, selanjutnya akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEDAH RUMAH PADA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DESA RINTISAN KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

B. Fokus Penelitian

Memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan membatasi fokus masalah dalam penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, penelitian ini juga dibatasi dengan menggunakan teori Donal S. Van meter dan Carl E. Van Horn dalam (Subarsono, 2015:99-101) dapat dilihat dari beberapa aspek-aspek yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumberdaya
3. Hubungan antar organisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
6. Disposisi implementor

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada dilatar belakang, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan teori, terutama dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya tentang Kebijakan Publik
2. Manfaat Secara Praktis
Dapat memberi masukan kepada Pemerintah Desa khususnya Desa Rintisan mengenai penerapan kebijakan RTLH dalam mengurangi RTLH dan mensejahterakan masyarakat. Serta sumbangan pemikiran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Khairun Nisa (2022) dalam skripsinya yang berjudul **“Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Tahun Anggaran 2020 Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Galagah Hulu)”** Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan dalam waktu pencairan dan pelaksanaan program, minimnya kerjasama dari pihak-pihak terkait seperti Kasi Kessos dan Pemerintah Desa, serta kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Selain itu, tidak adanya kejelasan jumlah penerima manfaat setiap tahunnya juga menjadi perhatian utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan Program RS-RTLH Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu) serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik quota sampling, melibatkan 15 informan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk

menjamin kredibilitas data, peneliti menerapkan strategi seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan referensi, serta member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program RS- RTLH di Kecamatan Sungai Tabukan, khususnya di Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu, belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program, yang berujung pada partisipasi yang minim, terutama dalam tahap pelaksanaan. Selain itu, rendahnya proporsi sasaran penerima manfaat turut menyebabkan keterlambatan dalam implementasi program. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program meliputi faktor pendukung seperti partisipasi masyarakat dan kelengkapan dokumen administratif, serta faktor penghambat seperti kondisi geografis dan fluktuasi harga bahan bangunan. Dinas Sosial diharapkan agar lebih optimal dalam menyelenggarakan program RS-RTLH dengan meningkatkan jumlah penerima setiap tahunnya, serta memperluas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Desa Galagah dan Galagah Hulu juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan informasi kepada warganya mengenai program ini, serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka.

2. Fitriana Syanistri (2020) dalam skripsinya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KELURAHAN AIR RAJA KECAMATAN GALANG KOTA BATAM”** Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Implementasi Program bantuan rumah tidak layak huni merupakan program meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Sosial Kota Batam. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni tidak terlepas dari keberhasilan penerapan yang akan dicapai meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam serta mengetahui faktor hambatan Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campura kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam melalui empat indikator yang berada pada kata gori "Cukup Terlaksana" hal ini dimana diketahui Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Air masih ditemuinya penerima bantuan tergolong masyarakat mampu sehingga penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan

peraturan yang ditetapkan. Namun penulis menyarankan terhadap Dinas Sosial Kota Batam agar dapat melakukan pendataan dan pengawasan penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan melakukan kerjasama dengan masyarakat Desa agar penerima bantuan tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian kebijakan publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang secara prinsip dirancang untuk mengarahkan tindakan secara sistematis dan konsisten guna mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, istilah "publik" dalam konteks kehidupan sehari-hari di Indonesia umumnya diartikan sebagai negara atau masyarakat umum.

Muchlis Hamdi, (2015:1), “salah satu *output* penyelenggaraan pemerintah, di samping pelayanan publik, barang publik, dan regulasi. Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintah terutama dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan”.

Menurut Chief 1. O. Udoji dalam (Sholichin Abdul Wahab, 2016: 15). ‘kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang paling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat’.

Robert Eyestone dalam (Didin Muhafidin dan Yadimann, 2020:1). 'kebijakan publik mencerminkan keterkaitan antara lingkungan masyarakat dengan pemerintah yang menaunginya. Namun, pengertian ini masih tergolong umum dan belum secara spesifik menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kebijakan publik itu sendiri'.

Carl J. Frederick dalam (Taufiqurokhman, 2018:2). 'kebijakan dapat diartikan sebagai seperangkat tindakan atau aktivitas yang dirancang oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks tersebut, terdapat berbagai tantangan maupun peluang yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan yang diusulkan, dengan tujuan untuk mencapai hasil atau sasaran tertentu'.

Menurut Thomas Dye dalam (Subarsono, 2022:2) 'kebijakan publik merupakan segala bentuk keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Definisi ini bersifat luas karena mencakup juga tindakan tidak melakukan apa pun oleh pemerintah ketika menghadapi isu-isu publik'. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa: (1) kebijakan publik adalah hasil keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan, bukan oleh organisasi non-pemerintah, dan (2) kebijakan publik mencerminkan keputusan atau pilihan tindakan yang harus diambil oleh lembaga pemerintah. Sementara itu, James E. Anderson dalam sumber yang sama mendeskripsikan kebijakan publik sebagai keputusan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah. Meskipun kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh berbagai aktor dan faktor, pada dasarnya kebijakan ini merupakan hasil dari keputusan pemerintah di bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sektor lainnya.

David Easton dalam (Subarsono, 2022:3) ‘setiap kali pemerintah merumuskan kebijakan publik, pada saat yang sama pemerintah juga mendistribusikan nilai-nilai kepada masyarakat. Hal ini karena setiap kebijakan selalu memuat seperangkat nilai tertentu di dalamnya’.

Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam (Subarsono, 2022:3), ‘kebijakan publik seharusnya memuat tujuan yang ingin dicapai, mencerminkan nilai-nilai yang dianut, serta mempertimbangkan praktik-praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat’.

b. Jenis-jenis kebijakan publik

Secara tradisional, pakar ilmu politik mengatagorikan kebijakan public kedalam kategori: (1) kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negri dan sebagainya), dan (2) kelembagaan (misalnya kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru, dan kebijakan masa orde lama). Kategori lain tentang kebijakan dibuat oleh James Anderson dalam (Subarsono, 2022:19-21) sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Substantif dan Kebijakan Prosedural. Kebijakan substantif merujuk pada kebijakan yang berisi tentang apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah, yaitu isi atau tindakan nyata yang akan diambil.
- 2) Kebijakan Distributif, Regulatori, dan Redistributif. Kebijakan Distributif berkaitan dengan pembagian layanan atau manfaat

kepada individu, kelompok, atau bagian tertentu dari masyarakat tanpa mengurangi bagian kelompok lain.

- 3) Kebijakan Material atau Kebijakan Simbolis. Kebijakan Material memberikan hasil yang nyata dan langsung berupa sumber daya atau keuntungan konkret kepada kelompok penerima.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*publik goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan publik *goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik.

c. Ciri-ciri Kebijakan

Anderson dalam (Zainal Abidin, 2016:4) mengemukakan ciri-ciri dari kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Memiliki Tujuan yang Jelas
Setiap kebijakan disusun dengan maksud dan arah yang spesifik, bukan dibuat secara sembarangan atau sekadar memanfaatkan situasi tertentu tanpa perencanaan yang matang.
- 2) Terintegrasi dengan Kebijakan Lain
Sebuah kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan kebijakan lainnya dalam sistem masyarakat, serta berkaitan erat dengan proses implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
- 3) Merupakan Tindakan Nyata Pemerintah
Kebijakan mencerminkan langkah konkret yang diambil oleh pemerintah, bukan sekadar wacana, gagasan, atau rencana yang belum diwujudkan.
- 4) Bersifat Normatif
Kebijakan bisa berupa larangan terhadap suatu tindakan (bersifat negatif), ataupun berupa petunjuk dan dorongan untuk melakukan tindakan tertentu (bersifat positif).
- 5) Berlandaskan Hukum
Kebijakan bersumber dari ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan legal dan otoritas untuk memaksa masyarakat dalam pelaksanaannya.

d. Tahap-tahap Kebijakan

Tahapan-tahapan Kebijakan Menurut William Dunn

1) Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Tahap ini merupakan fase yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Sebelum suatu kebijakan ditetapkan

dan dijalankan, para pengambil keputusan perlu menyusun agenda dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan mengidentifikasi berbagai masalah yang berkaitan. Masalah-masalah tersebut kemudian disaring untuk menentukan mana yang termasuk sebagai persoalan publik dan layak menjadi prioritas. Isu yang berhasil masuk dalam daftar prioritas publik akan berpeluang lebih besar untuk memperoleh alokasi sumber daya pemerintah.

Agenda setting juga sangat krusial dalam menentukan isu publik apa saja yang akan diangkat oleh pemerintah. Isu kebijakan, atau *policy issues*, biasanya muncul karena adanya perbedaan pandangan antar aktor mengenai tindakan yang telah atau akan dilakukan, atau perbedaan dalam mendefinisikan dan menilai karakter suatu persoalan. Menurut William Dunn, isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan yang melibatkan formulasi, perincian, penjelasan, hingga penilaian terhadap suatu masalah.

Beberapa kriteria agar sebuah isu dapat dijadikan sebagai bagian dari agenda publik meliputi: telah mencapai kondisi kritis dan berpotensi menimbulkan ancaman serius jika diabaikan; memiliki dampak besar dan signifikan; memperoleh perhatian dari media massa; menyentuh aspek kekuasaan; serta menyangkut masalah yang meski sulit dijelaskan namun nyata dirasakan oleh masyarakat.

Penyusunan agenda seharusnya mempertimbangkan tingkat urgensi, nilai substansi kebijakan, serta keterlibatan para pemangku kepentingan, agar tidak mengaburkan prioritas dan arah kebijakan yang sebenarnya.

2) Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*)

Setelah suatu masalah berhasil masuk dalam agenda, tahapan selanjutnya adalah merumuskannya menjadi kebijakan. Pada tahap ini, para pembuat kebijakan akan mendefinisikan masalah secara lebih jelas dan mencari alternatif solusi. Berbagai opsi kebijakan akan dianalisis dan dipertimbangkan sebagai bentuk pemecahan masalah. Seperti halnya proses memasukkan isu ke dalam agenda, tahap formulasi juga melibatkan perjuangan dalam menentukan pilihan solusi terbaik.

3) Adopsi atau Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tahap ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan kewenangan terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, proses legitimasi menjadi penting agar masyarakat menerima dan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

4) Pelaksanaan Kebijakan (*Policy Implementation*)

Setelah kebijakan disahkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Alternatif solusi yang telah disepakati

sebelumnya mulai dijalankan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan sering kali menghadapi berbagai hambatan. Rencana yang telah disusun secara sistematis di atas kertas, bisa berbeda saat diterapkan di lapangan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti birokrasi, sumber daya, dan koordinasi antar instansi.

5) Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai kebijakan, baik dari segi isi, pelaksanaan, maupun dampaknya. Evaluasi ini dipandang sebagai fungsi penting dalam siklus kebijakan, karena dapat memberikan gambaran sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai dan apa saja yang perlu diperbaiki di masa mendatang.

e. Syarat-syarat kebijakan

Syarat-syarat kebijakan yaitu:

- 1) Kondisi eksternal tidak menimbulkan kendala yang serius
- 2) Tersedianya waktu
- 3) Tersedianya sumber-sumber
- 4) Kebijakan didasari oleh hubungan kausalitas
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan sedikit mata rantai terhubungnya
- 6) Hubungan ketergantungan harus kecil
- 7) Pembaharuan yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas terperinci dan penempatan yang tepat

9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

10) Pihak yang memiliki kewenangan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian implementasi kebijakan

Secara sederhana, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses penerjemahan peraturan menjadi tindakan nyata. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dan sering kali sarat dengan muatan politik, karena melibatkan campur tangan berbagai kepentingan.

Menurut Deddy Mulyadi (2016: 26-27), "Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang ditetapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengakibatkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat."

Tachjan dalam (Tahir, 2015:53), 'mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik sebab produk kebijakan apapun yang akan diimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan publik tersebut'.

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2016:139) mengidentifikasikan 'Implementasi kebijakan sebagai tindak yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam putusan kebijakan'.

Ada enam variabel yang mengimplementasikan, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar dan Sasaran Kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sarana kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
2. Sumberdaya
Implementasi perlu dukungan sumber daya baik dari manusia maupun sumberdaya non-manusia. Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.
3. Hubungan antar organisasi
Banyak dalam program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan program.
4. Karakteristik Agen Pelaksana
Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana ialah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi sebuah program.
5. Disposisi Implementor
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.
Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yaitu mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Howlett & Ramesh dalam (Leo Agustino, 2020:145), 'implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan program atau kebijakan, yaitu mengubah rencana menjadi tindakan nyata. Definisi ini sejalan dengan pandangan Barrett yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan berarti menerjemahkan kebijakan menjadi aksi atau tindakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan isi atau tujuan kebijakan dalam bentuk aplikasi konkret sesuai dengan yang diatur dalam kebijakan tersebut'.

Nugroho dalam (Anirwan, 2025:43) mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan mencakup tiga unsur utama, yaitu: (a) adanya tujuan atau sasaran, (b) adanya aktivitas atau tindakan, dan (c) adanya hasil yang dicapai. Namun demikian, ketiga unsur tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas implementasi, karena pada dasarnya implementasi merupakan proses yang bersifat dinamis. Dalam pelaksanaannya, kebijakan dijalankan melalui serangkaian kegiatan atau tindakan yang pada akhirnya diharapkan menghasilkan output yang sejalan dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut.

Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*Output*), yaitu: tercapainya atau tidaknya suatu tujuan. Hal ini tidak jauh beda dengan apa yang diutarakan oleh Leo Agustino (2020:147)

Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan menilai proses pelaksanaannya, yaitu dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk melihat tindakan nyata dari proyek-proyek individual. Selain itu, pengukuran juga

dilakukan dengan mengevaluasi apakah tujuan yang ingin dicapai oleh program tersebut berhasil terpenuhi.

Rippley dan Franklin dalam (Djani William, 2022:63).’mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif’, yaitu:

1. Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya. Artinya setiap aparatur dalam birokrasi atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujudkan pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan.
2. Perspektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah. Dalam hal ini para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi problem solver bukan malah sebaliknya menjadi pemicu masalah.
3. Perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan. Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri, Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan kinerja individu dan para implementor kebijakan itu sendiri.

Perlu dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat krusial dalam keseluruhan proses kebijakan, karena melalui tahap ini masalah publik dapat diselesaikan atau justru gagal diatasi. Udoji dalam Leo Agustino (2020:147) dengan menulis bahwa, *"The execution of policies is as, important of not more important than policy-making Policies will remain dreams or blue print file jackets uses there are implemented"* (yang di terjemahkan secara bebas pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu penting bahkan mungkin lebih penting daripada perumusan

kebijakan itu sendiri. Tanpa pelaksanaan yang nyata, kebijakan hanya akan menjadi rencana indah atau sekadar dokumen yang tersimpan tanpa hasil nyata).

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variable atau faktor, dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu sama yang lain. Ada beberapa teori implementasi menurut para ahli dalam Subarsono (2022:89-101), yaitu:

1) Teori George C. Edwards III

Dalam pandangan Edwards III (2022), Implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) komonikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variable tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

a) Komunikasi

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, sangat penting bagi pelaksana (implementor) untuk memahami secara jelas apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan perlu disampaikan dengan tepat kepada kelompok sasaran. Jika informasi ini tidak tersampaikan atau tidak dipahami oleh pihak yang dituju, besar kemungkinan akan muncul penolakan atau ketidaksepakatan dari mereka.

b) Sumberdaya

Meskipun komunikasi sudah berjalan dengan baik, implementasi tetap tidak akan efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya. Sumber daya ini bisa berupa tenaga manusia yang kompeten maupun anggaran yang memadai. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan hanya akan menjadi dokumen di atas kertas tanpa realisasi.

c) Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, karakter, dan komitmen para pelaksana kebijakan, seperti kejujuran dan sikap terbuka terhadap partisipasi. Jika implementor memiliki sikap yang sejalan dengan maksud kebijakan, maka pelaksanaan akan berjalan lebih lancar. Sebaliknya, perbedaan pandangan atau kurangnya komitmen bisa menghambat efektivitas implementasi.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi pelaksana kebijakan juga berperan penting dalam proses implementasi. Salah satu elemen kunci dalam struktur ini adalah keberadaan prosedur operasional standar (SOP) yang menjadi acuan bagi para pelaksana. SOP membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan arahan kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Teori Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (2022), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu substansi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaan (*context of implementation*). Variabel yang berkaitan dengan isi kebijakan mencakup beberapa aspek penting, antara lain: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tercermin dalam substansi kebijakan yang dirumuskan, (2) jenis manfaat yang diberikan kepada kelompok sasaran, (3) tingkat perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut, (4) ketepatan penempatan atau cakupan wilayah program, (5) kejelasan dalam penunjukan pelaksana kebijakan secara rinci, serta (6) ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Paul A (2022). Sabatier ada tiga kelompok variable yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), (3) variable lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*)

a) Karakteristik masalah

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
3. Proposi kelompok sasaran terhadap total populasi.
4. Cakupan perubahan perilaku yang di harapkan.

b) Karakteristik kebijakan

1. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci suatu kebijakan akan mudah di implementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
3. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial.
4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

c) Lingkungan kebijakan

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
3. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carld E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn, ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumberdaya, (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan (6) disposisi implementor.

- a) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur maka, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- b) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).
- c) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan

koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

- d) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- e) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, bagaimana sikap opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah politik mendukung implementasi kebijakan.
- f) Disposisi Implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

5) Teori G. shabbier Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Ada empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program yakni: (1) kondisi lingkungan, (2) hubungan antar organisasi, (3) sumberdaya

organisasi untuk implementasi program, (4) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

6) Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining (2022) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program yakni: (1) logika kebijakan, (2) lingkungan tempat kebijakan di operasikan dan kemampuan implementor kebijakan.

Logika dari suatu kebijakan merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan memiliki dasar yang rasional (*reasonable*) serta didukung oleh landasan teoritis yang kuat.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan di mana kebijakan tersebut dijalankan. Lingkungan kebijakan ini mencakup berbagai aspek, antara lain sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta kondisi fisik atau geografis.

3. Pelaksanaan Kebijakan

Implementasi kebijakan merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Tahap ini pada dasarnya berfokus pada bagaimana pemerintah menjalankan proses-proses yang diperlukan agar kebijakan tersebut menghasilkan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya. Mengingat bahwa implementasi memiliki makna dan

karakteristik yang dapat ditinjau dari berbagai dimensi, maka tahap ini secara otomatis menunjukkan tingkat signifikansinya. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan juga dapat melibatkan pengembangan lebih lanjut atas tujuan-tujuan yang telah dirumuskan oleh pejabat atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemiskinan diartikan sebagai kondisi yang serba kekurangan atau berpenghasilan rendah. Istilah "miskin" berasal dari kata as-sakan, yang bermakna kebalikan dari sesuatu yang selalu bergerak dan bergolak. Ibnu Faris menjelaskan bahwa: *“huruf sin, kaf, dan nun merupakan huruf asli yang secara umum menunjukkan makna kebalikan dari sesuatu yang bergerak atau bergejolak”* seperti pada ungkapan *sakana asy-syat’u yaskunu sukunan syakinan*. Oleh karena itu, miskin dapat diartikan sebagai seseorang yang berada dalam keadaan tenang akibat kefakiran, yaitu individu yang tidak memiliki apa pun sama sekali atau yang memiliki sesuatu namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

Definisi mengenai kemiskinan sangat bervariasi, mulai dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar serta memperbaiki kondisi hidup, terbatasnya peluang untuk

berusaha, hingga pemahaman yang lebih luas yang mencakup dimensi sosial dan moral. Dalam pengertian yang sempit, kemiskinan diartikan sebagai kondisi kekurangan sumber daya finansial dan barang untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Sementara itu, dalam arti yang lebih luas, kemiskinan dipandang sebagai fenomena yang bersifat kompleks dan multidimensional.

Menurut Kurniawan kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak Definisi lainnya yang bisa digunakan adalah menurut European union bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya (material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas.

2. Indikator Kemiskinan

Indikator-indikator kemiskinan meliputi berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Menurut SMERU, kemiskinan memiliki berbagai dimensi:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).
- b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).

- c. Tidak adanya jaminan masa depan (btiadanya investasi pendidikan dan keluarga).
- d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- f. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
- g. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- h. Ketidakmampuan dalam berusaha karena cacat fisik maupun mental.

Salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) seseorang untuk hidup secara normal. Sedangkan Menurut Bank Dunia, penyebab dasar kemiskinan adalah:

- a. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal
- b. Terbatasnya kesediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.
- c. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sector.
- d. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.

- e. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan sektor ekonomi (ekonomi tradisional dengan ekonomi modern).
- f. Rendahnya produktifitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
- g. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan hidup seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
- h. Tidak adanya tata pemerintah yang bersih dan baik (*good governance*).
- i. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

3. Macam-macam Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks.

David Cox membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:

- a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara maju. Di Negara-negara berkembang seringkali orang yang miskin semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan.
- b. Kemiskinan subsistem (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan),

kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang terjadi oleh hakekat dan pertumbuhan perkotaan).

- c. Kemiskinan sosial yaitu kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
- d. Kemiskinan konsekuensial yaitu kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Ukuran kemiskinan yang didasarkan pada tingkat pendapatan umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan absolut, yang berarti pendapatan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum guna mempertahankan kelangsungan hidup. Sementara itu, kemiskinan relatif merujuk pada kondisi ketimpangan pendapatan antar kelompok dalam masyarakat, di mana individu atau kelompok yang meskipun berada di atas garis kemiskinan, tetap dianggap miskin relatif karena memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu.

Selain itu kemiskinan juga masih ada berbagai macam, antara lain:

- 1) Kemiskinan kultural, dimana masyarakat dinamakan miskin kultural apabila mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- 2) Kemiskinan struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

5. Devinisi Rumah Tidak Layak Huni

Program Bedah Rumah atau Rehabilitas Sosial Rumah Tidak layak Huni adalah program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni Kegiatan ini tidak hanya berfokus kepada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteraan keluarga dan berdampak pada peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan.

Adapun definisi rumah tidak layak huni adalah sebagai berikut:

- a. Atap dalam kondisi tidak baik atau kualitas rendah.
- b. Mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah, termasuk dinding dengan pasangan bata yang sudah lapuk.
- c. Lantai terbuat dari tanah/kayu/semen/tegel dengan kondisi tidak baik, rusak, atau kualitas rendah
- d. Tidak memiliki ventilasi udara yang memadai.
- e. Tidak memiliki jamban/memiliki jamban tidak layak.
- f. Setelah calon penerima bantuan dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membentuk kelompok di setiap desa atau kelurahan dalam satu kecamatan. Kelompok ini terdiri dari paling sedikit 5 kepala keluarga dan paling banyak 15 kepala keluarga, dengan fasilitasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dalam kelompok tersebut dibentuk struktur kepengurusan yang meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara.

Berikut gambaran rumah tentang rumah tidak layak huni (RTLH):

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)

2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1), kualitas fisik rumah dan (2). kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Trí, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun ciri dan karakteristik tersebut adalah:

- a. Kualitas konstruksi bangunan dengan bahan beton bertulang memenuhi SNI
- b. Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan kayu memenuhi SNI
- c. Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan baja memenuhi SNI
- d. Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan selain hal tersebut diatas minimal mampu menahan guncangan gempa 8 skala richter (rata-rata gempa yang terjadi di Indonesia antara 6-7 skala richter.
- e. Luas bangunan menggunakan standar luas per orang (9 m²/org) dalam pasal 22 ayat (3) UU 1 Tahun 2011

6. Persyaratan Rumah Tidak Layak Huni

- a. Keselamatan dan keamanan konstruksi bangunan
- b. Kecukupan minimum luas bangunan
- c. Keadaan sosial dan kesehatan penghuni

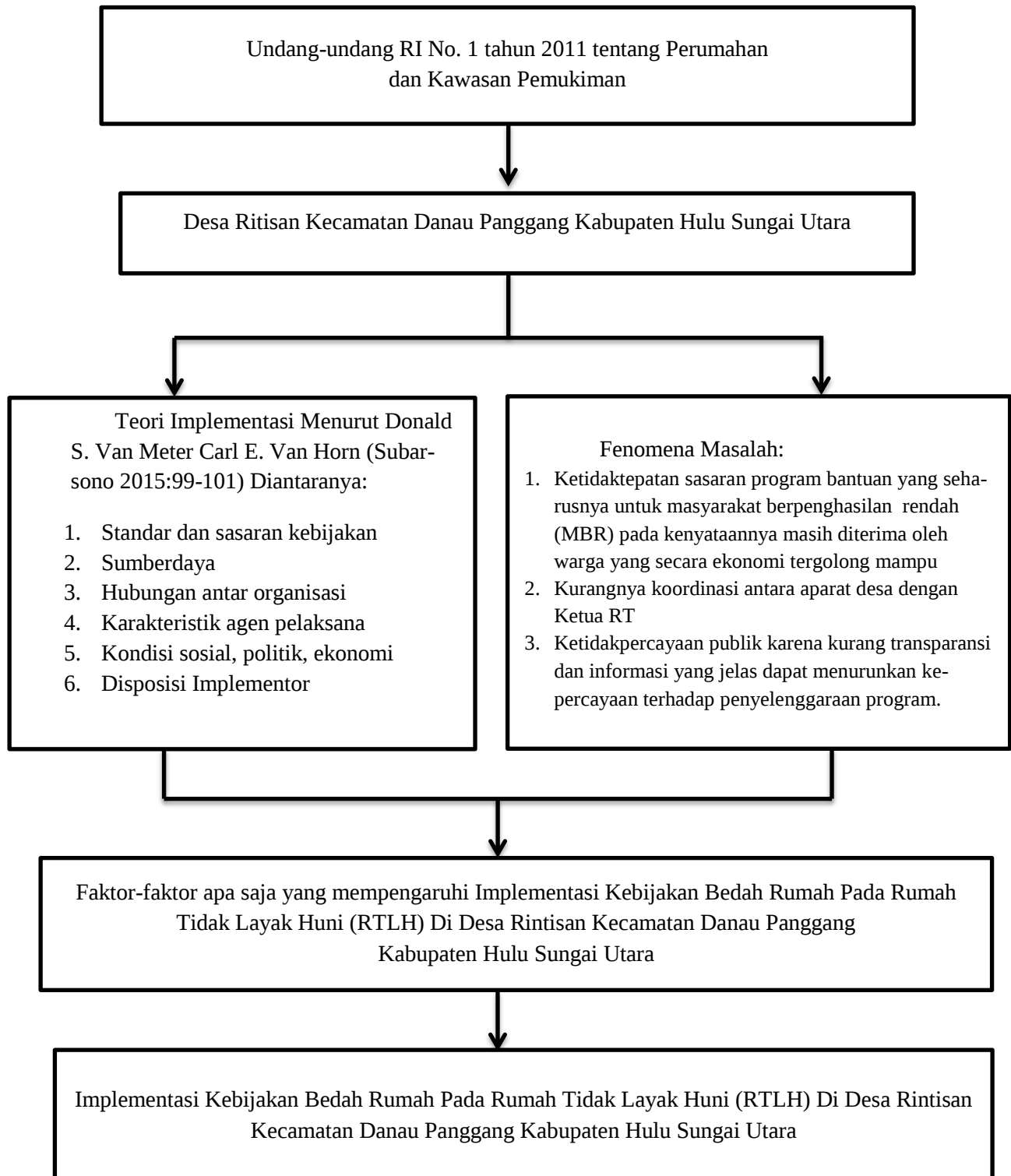
C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-undang RI No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penelitian ini dijelaskan melalui teori yang dikembangkan oleh Donald S. Van Meter Carl E. Van Horn dalam (Subarsono, 2015:99-101) dapat dilihat dari beberapa aspek-aspek yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumberdaya
3. Hubungan antar organisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
6. Disposisi implementor

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Desa Rintisan Jl. Kali Utar Kode Pos 71454

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa serta mengungkapkan secara jelas data yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada rumah tidak layak huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara selain itu peneliti juga bermaksud untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam agar bisa menemukan pola dan juga teori yang benar mengenai kebijakan tersebut.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif. Yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Secara konkret penelitian ini akan mendeskripsikan gambaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Data Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dengan kata lain data primer merupakan data langsung yang dikumpulkan dan diperoleh dari informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sumber datanya diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang didapat melalui buku-buku, data dan dokumen yang berhubungan dengan implementasi program bedah rumah atau rehabilitas rumah tidak layak huni.

2. Sumber Data

Sumber data adalah data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari informan. Dalam memilih informan, peneliti menggunakan teknik *purposive* (bertujuan) yang dimana adalah teknik pengambilan sumber sampel data dari pertimbangan tertentu. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Untuk menggali data secara lebih akurat, sumber data yang penulis perlukan disebut dengan informan, yaitu pihak-pihak yang dapat diminta keterangan terkait dengan program RS-RTLH seperti, Staf Dinas perumahan, kawasan pemukiman, Kepala Desa Rintisan, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintah Desa, Kasi Pelayanan, Penerima RS-RTLH, dan Masyarakat setempat.

Tabel 3. 1
Identitas Informan

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Shaimi Ramadahani	Staf Dinas perumahan, kawasan pemukiman
2	Ramadhani	Staf Dinas perumahan, kawasan pemukiman
3	Sariansyah	Kepala Desa Rintisan
4	Khamsinah	Sekretaris Desa
5	M. Amin	Kasi Pemerintah Desa
6	Muna	Kasi Pelayanan
7	Hamdani	Penerima RS-RTLH Desa Rintisan
8	Saipullah	Penerima RS-RTLH Desa Rintisan
9	Siti Radiah	Penerima RS-RTLH Desa Rintisan
10	Yati	Penerima RS-RTLH Desa Rintisan
11	Diana	Masyarakat Desa Rintisan
12	Raudah	Masyarakat Desa Rintisan
13	Herlina	Masyarakat Desa Rintisan
14	Raniah	Masyarakat Desa Rintisan
15	Juhairiyah	Masyarakat Desa Rintisan
JUMLAH		15 ORANG

Sumber : Dibuat Peneliti, 2025

E. Desain Operasional Penelitian

Desain Operasional adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data.

Tabel 3. 2

Desain Operasional Penelitian

VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR
Implementasi Kebijakan dalam Teori Donald S. Van Meter Carl E Van Horn (Subarsono 2015: 99-101)	a. Standar dan sasaran kebijakan	a. Kejelasan Standar
		b. Tujuan Kebijakan
	b. Sumberdaya	a. Sumber daya manusia
		b. Sumber daya finansial
	c. Hubungan antar organisasi	a. Dukungan Instansi Lain
		b. Koordinasi dengan instansi lain
	d. Karakteristik agen pelaksana	a. Komitmen pelaksana terhadap program
		b. Tanggung jawab dan profesionalitas agen pelaksana
	e. Kondisi sosial, politik, ekonomi	a. Kondisi sosial
		b. Kondisi politik
		c. Kondisi ekonomi
	f. Disposisi Implementor	a. Pemahaman pelaksana
		b. Sikap atas kebijakan

Sumber : Dibuat Peneliti, 2025

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dengan masalah yang diteliti di lapangan pengumpulan data dilakukan dengan tehnik:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk merasakan serta memahami suatu fenomena, berdasarkan pengetahuan dan konsep yang telah dimiliki sebelumnya. Melalui proses ini, diperoleh informasi yang diperlukan guna mendukung kelanjutan suatu penelitian.

(Sugiyono, 2016:226), “Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu di kumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapatdiobservasi dengan jelas”.

2. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua pihak yang dilakukan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga memungkinkan terbentuknya pemahaman atau makna terhadap suatu topik tertentu.

Esterberg dalam (Sugiyono, 2016.233) ‘mengemukakan beberapa macam wawancara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan), wawancara semiterstruktur wawancaralebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan permasalahan (pelaksanaan secara lebih terbuka dimana informan dimintai pendapat dan ide-idenya). dan wawancara tidak terstruktur (merupakan wawancara yang bebas yang mana peneliti

tidak menggunakan pedoman wawancara yang lebih tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya)’.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menghimpun dan menyajikan dokumen-dokumen berdasarkan bukti yang valid, yang berasal dari sumber-sumber informasi tertulis seperti naskah, surat wasiat, buku, peraturan perundang-undangan, dan sejenisnya. Sugiyono (2016:240), ”mengemukakan pendapatnya mengenai dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yan sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam (Johnny Saldana, 2015: 30-33) yaitu :

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan transkrip wawancara, dokumen dan materi (temuan) empirik lainnya. Kondensasi (pengembunan) data berarti mengubah data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat (air).

2. Display data

Display data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian, baik yang terbentuk matrik ataupun pengkodean, dari hasil kondensai data dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data memverifikasikan sehingga menjadi kebermanaan data.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penetapan Kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan dengan *membercheck*, triangulasi dan audit trail, sehingga menjamin signifikansi atau kebermanaan hasil penelitian.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data adalah pengajian data untuk menilai hasil penelitian yang akan ditunjuk jika partisipan menyatakan bahwa transkrip penilaian memang benar-benar sebagai pengalaman dari dirinya sendiri.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Imam Gunawan, 2015:210)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

1. Pengamatan
Dengan pengamatan berarti peneliti melakukan penelitian secara langsung di lapangan, melakukan wawancara dengan narasumber yang ditemui di lapangan.
2. Peningkatan ketekunan dalam bentuk penelitian
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan uraian peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
3. Triangulasi
Triangulasi dalam pengajian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
4. Analisis data negatif
Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai dengan penelitian hingga pada saat tertentu.
5. Menggunakan bahan referensi
Yang dimaksud referensi disini adalah adanya bahan pendukung untuk membuktikan data yang dikumpulkan penulis.
6. Mengadakan membercheck
Membercheck Adalah proses pengecekan data yang diperoleh dari peneliti kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Z. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salembahumanika.
- Agustino Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung CV. Alfabeta.
- Agustino. (2016). *Dasar Dasar Kebijakan Publik* cetakan X Bandung: Alfabeta.
- Anonim, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 *Tentang Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*.
- Anonim, UU No. 1 Tahun 2011 *Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman*.
- Anirwan. (2025). *Konsep Teori Administrasi Publik Dan Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: penerbit BUDI UTAMA (Anggota IKAPI).
- Didin Muhafidin, Yadiman. (2020), *Dimensi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Djani, William. (2022), *Kebijakan Publik Dan Implikasinya Di era Otonomi Daerah* Penerbit: Zifatama Jawa.
- Fitriana Syanistri (2020) Universitas Islam Riau dalam penelitian terdahulu berjudul *Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam*.
- Gunawan, Imam.(2015). *Metode penelitian kualitatif: Teori Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indoesia.
- Khairun Nisa, (2022) STIA Amuntai dalam penelitian terdahulu berjudul *Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2020 Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu)*.
- Mulyadi, Deddy 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Saldana, Johny. (2015). *Qualitative Data Analysis: a method sourcebook*. Amerika: SAGE, hlm 30-33.

- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Cet.VII. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR
- Subarsono. (2022). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Cetakan ke-11. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. (2015). *Kebijakan Publik dan Transportasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurokhman. (2018). *Kebijakan publik, Pendelagasian Taggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara pemerintahan, Cet. I*. Jakarta Fakultas Ilmu Sosial da Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tim Penyusun. (2022). *Buku Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*. Penerbit: Stia Amuntai.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.